

Implementasi Pemerintah Daerah dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Pemerintah Jakarta Pusat

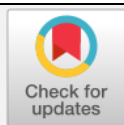
Asmi Rezkieh Tanjung¹, Salsabila Rahmadani¹, Ridho Satria Putra Kelana¹

Jurusan Administrasi Publik, Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta

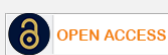
Korespondensi: asmitanjung@gmail.com

INFO ARTIKEL

Info Publikasi:
Research Article



Dikirim: 13 Februari, 2023;
Diterima: 14 Februari, 2023;
Dipublikasi: 28 Februari, 2023;



Copyright © 2023. Owned by Author(s), published by JSC

This is an open-access article.
License: Attribution-NonCommercial-ShareAlike (CC BY-NC-SA)

How to cite:

Tanjung, A. R., Rahmadani, S., & Kelana, R. S. P. (2023). Implementasi Pemerintah Daerah dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Pemerintah Jakarta Pusat. *Journal of Social Contemplativa*. 1(1); 54-62.

ABSTRAK

Dalam APBD, negara mengalokasikan dana berupa anggaran investasi untuk peningkatan aset tetap serta aset lainnya selama lebih dari satu tahun aturan. Anggaran investasi ini berdasarkan di kebutuhan ruang tempat kerja daerah dan infrastruktur serta kelancaran aplikasi tugas pemerintahan serta kebutuhan lembaga publik. Pemerintah daerah diharapkan untuk memenuhi atau melampaui anggaran pendapatan, yang merupakan batas minimal dari keseluruhan pendapatan. Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah mengurangi nilai kekayaan bersih. Dana yang dianggarkan di tingkat daerah harus digunakan untuk melaksanakan tanggung jawab pemerintah menurut undang-undang dan kewenangan yang diberikan kepada provinsi, kabupaten, atau kota oleh undang-undang, provinsi, atau kabupaten/kota. Fokus pembangunan adalah industri, pariwisata, ketahanan pangan, mikro, UKM, infrastruktur, transformasi digital, pembangunan rendah karbon, reformasi rendah karbon, reformasi jaminan sosial, reformasi pendidikan dan keterampilan, dan reformasi perawatan kesehatan, dengan tujuan dan sasaran yang saat ini perlu disikapi di Indonesia sehubungan dengan perang melawan virus COVID-19 yang sedang berkembang. Semua pendapatan dan/atau pengeluaran yang dapat diganti yang akan diterima kembali oleh pemerintah negara bagian baik pada tahun



anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran yang diharapkan.

Kata Kunci: Anggaran; Pemerintah Daerah; Pendapatan Asli Daerah

1. Pendahuluan

Sejak pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah daerah ditugasi untuk mempercepat laju pertumbuhan dan perkembangan daerahnya, berkembang, menyerap orang dan harapan baru, dan memenuhi kebutuhan masyarakat yang tinggal di sana (Nul Hakim et al., n.d.). Pemerintah daerah wajib memenuhi anggaran pendapatan minimal yang merupakan target dari total pendapatan yang telah ditetapkan. Bagi pemerintah daerah, kinerja pendapatan yang sangat baik adalah ketika pendapatan riil melampaui yang diproyeksikan dalam anggaran, sedangkan kinerja pendapatan yang buruk adalah ketika pendapatan aktual tidak sesuai dengan yang diproyeksikan. Jika sasaran pendapatan dapat dipenuhi atau dilampaui, tidak perlu khawatir; namun, jika tujuan pendapatan tidak realistis, penting untuk menggali lebih dalam alasan kegagalan mencapai tujuan tersebut (Azizah & Dewi, 2021). DPRI menyetujui anggaran tahunan pemerintah negara Indonesia, yang dikenal sebagai APBN. Daftar proyeksi pendapatan dan belanja negara yang lengkap dan ekstensif untuk satu tahun anggaran dapat dilihat dalam APBN (1 Januari - 31 Desember). Pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan kegiatan pembangunan, pencapaian pertumbuhan ekonomi, peningkatan pendapatan nasional, pencapaian stabilitas ekonomi, serta penentuan arah dan prioritas pembangunan pada umumnya dapat dilakukan berkat APBN sebagai instrumen pengaturan pengeluaran dan pendapatan negara. Efisiensi APBN tergantung pada sistem anggaran yang terpelihara dengan baik dan dokumentasi yang cermat dari semua pendapatan dan pengeluaran (Nyoman Sri Ayu Lestari et al., 2018).

Dalam rangka melindungi dan meningkatkan taraf hidup masyarakat dan memenuhi kewajiban daerah, uang diprioritaskan untuk penyelenggaraan urusan wajib seperti peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan umum yang layak, serta

pembangunan suatu sistem jaminan sosial. Pengeluaran yang dilakukan baik dalam perekonomian langsung maupun tidak langsung membentuk apa yang dikenal sebagai komponen pengeluaran daerah (Arni Asari & Suardana, 2018). Peraturan di tingkat daerah biasanya memasukkan anggaran pendapatan dan belanja yang dimaksudkan untuk membantu pemerintah daerah menangani keuangan mereka sendiri. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan Prioritas Anggaran, yang akan menjadi pedoman bagi penyusunan anggaran pendapatan dan anggaran belanja tersebut. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disusun oleh eksekutif sesuai dengan kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan prioritas anggaran kemudian diajukan kepada dewan legislatif untuk dipelajari dan dibahas sebelum diabadikan menjadi Peraturan Daerah. Karena desentralisasi fiskal, sumber daya keuangan pemerintah daerah sangat terbatas, sehingga dana prioritas pembangunan yang dialokasikan untuk belanja daerah harus digunakan secara ekonomis, efisien, dan efektif untuk memaksimalkan keuntungan daerah sekaligus meminimalkan beban keuangan pemerintah secara keseluruhan. Mengukur kinerja keuangan sangat penting untuk pengelolaan belanja daerah yang baik karena membantu untuk menentukan apakah pemerintah daerah mampu membelanjakan dana publik dengan cara yang murah, efisien, dan efektif (Fathiyah et al., 2021). Setiap pembayaran yang dipotong dari Rekening Kas Umum Daerah yang melunasi kewajiban daerah dalam tahun anggaran berjalan dianggap sebagai belanja daerah. Anggaran provinsi atau daerah digunakan untuk menjalankan fungsi pemerintahan wajib dan pilihan di dalam provinsi, kabupaten, atau kotamadya, sebagaimana ditentukan oleh undang-undang (Arni Asari & Suardana, 2018).

Setiap daerah bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhannya sendiri, sebagaimana tercantum dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Setiap daerah perlu mengumpulkan uang sebanyak mungkin untuk pembangunan berkelanjutan jika ingin mampu membayar semua kewajiban keuangannya sendiri. Jika tersedia dana dan tenaga kerja yang memadai, pembangunan akan berjalan lancar. Pengalihan kekuasaan dari pemerintah pusat ke daerah atau kota menandai awal dari proses di setiap provinsi, kota, atau unit

administrasi lainnya. Dalam kerangka desentralisasi, pendelegasian dan pengalihan berbagai kewenangan berjalan beriringan.

2. Metode Penelitian

Metode kualitatif deskriptif digunakan untuk penyelidikan ini. Metode penelitian kualitatif deskriptif digunakan untuk mengumpulkan informasi yang dapat digunakan sebagai pengantar, atau konfirmasi, suatu konsep atau gejala. Sebelum melakukan penelitian, penulis terlebih dahulu harus mengidentifikasi target demografis. Istilah "populasi" digunakan untuk menggambarkan wilayah generalisasi yang mencakup hal-hal atau orang-orang dengan atribut dan karakteristik tertentu yang telah dipilih oleh peneliti untuk dipelajari. Survei ini menghitung populasi manusia dan wilayah. Dalam penelitian ini, jenis perpustakaan atau pendekatan penelitian yang digunakan. Sastra atau penelitian kepustakaan dapat diartikan sebagai kegiatan yang berkaitan dengan metode pengumpulan data perpustakaan, pembacaan dan penyimpanan bahan penelitian serta pengolahannya.

3. Hasil dan Pembahasan

a. Strategi Meningkatkan Pendapatan Anggaran Daerah Jakarta Pusat

Secara umum, strategi yang diterapkan pemerintah adalah membuat perpajakan lebih efisien dan komprehensif. Berdasarkan pembahasan di atas, strategi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Jakarta Pusat memiliki beberapa kendala seperti: SDM, kesadaran wajib pajak dan masalah kepolisian. Kurangnya SDM yang memenuhi syarat merupakan faktor utama dalam kegagalan setiap kebijakan, tidak peduli seberapa baik prinsip-prinsip yang ditetapkan atau seberapa efektif mereka dikomunikasikan. Keengganan wajib pajak untuk membayar uang hasil jerih payah mereka sebagian berasal dari kegagalan untuk mendidik mereka tentang pentingnya kontribusi mereka dan banyak cara di mana masyarakat umum mendapat manfaat dari kontribusi mereka. Sulit bagi administrator untuk memenuhi komitmen tenggat waktu mereka ketika tidak ada penegakan hukum terhadap wajib pajak, terlihat dari seringnya keterlambatan dalam mengumpulkan pajak wajib pajak.

Perluasan berupa pemetaan pajak/keuangan dan pendataan Wajib Pajak baru yang tidak

pernah diedit. Kinerja pemerintah dalam melaksanakan program peningkatan PAD harus dievaluasi untuk mengukur sejauh mana tujuan yang telah ditetapkan telah tercapai. Kriteria yang digunakan untuk mengukur kinerja pemerintah dalam menggali potensi PAD adalah efektivitas dan efisiensi. Kajian ini menunjukkan bahwa tindakan yang diambil oleh pemerintah kota untuk mengelola PAD telah efektif dan efisien selama lima tahun terakhir. Didukung dengan penetapan strategi yang tepat dan hasil yang baik, maka diharapkan tujuan kemandirian fiskal pasti akan tercapai, namun dalam prakteknya strategi dan hasil yang efektif dan efisien tidak selalu sejalan dengan pertumbuhan IKF yang merupakan ukuran untuk mencapai kemandirian fiskal. Ada faktor Lain di Jakarta Pusat yang menghambat kemandirian fiskal.

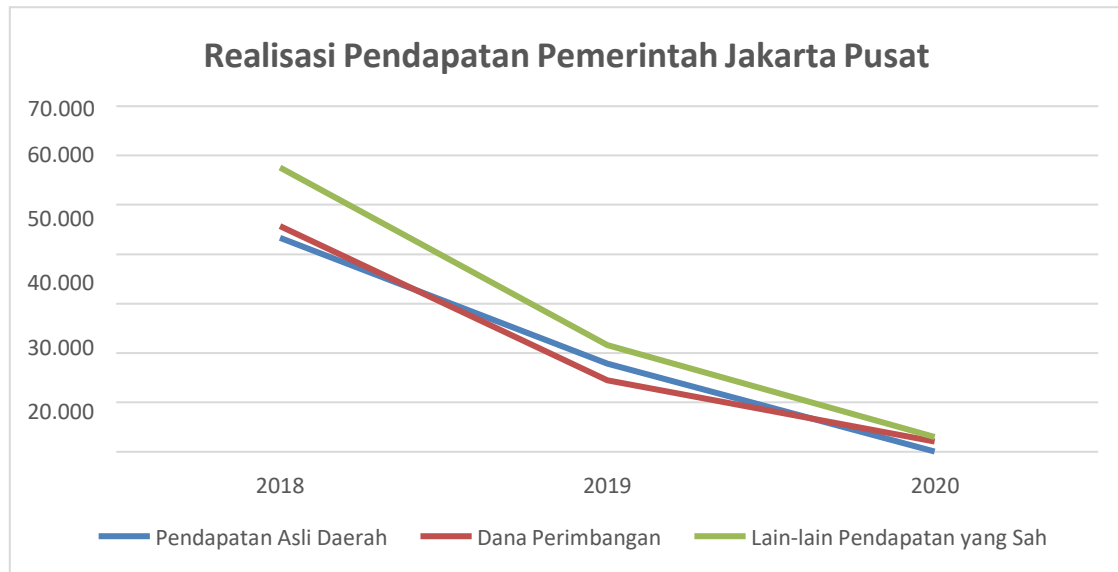
b. Pendapatan Pemerintahan Jakarta Pusat

Berdasarkan analisis peneliti, faktor-faktor tersebut antara lain:

1. Kurangnya pembangunan infrastruktur daerah
2. Tingkat ekonomi masyarakat yang rendah
3. Adanya batasan pajak yang dapat dikendalikan oleh pemerintah daerah

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat dikemukakan saran yang dapat menjadi alternatif strategi bagi pemerintah Kota Jakarta Pusat untuk meningkatkan pendapatan daerah guna mencapai kemandirian fiskal. yaitu:

1. Pembangunan infrastruktur perpajakan/pajak tangguhan
2. Peningkatan partisipasi masyarakat untuk mendukung peningkatan PAD
3. Peningkatan dan insentif investasi
4. Meningkatkan kapasitas personalia penyelenggara PAD
5. Mempersiapkan perhitungan akurat potensi dan produksi sektor pertambangan



Gambar 1 Realisasi Pendapatan Pemerintahan Jakarta Pusat

Sumber: <https://jakarta.bps.go.id/>

Berdasarkan laporan grafik 1 mengenai realisasi pendapatan pemerintahan di Jakarta Pusat peneliti menyimpulkan bahwa pendapatan daerah Jakarta Pusat mengalami penurunan. Strategi yang diterapkan Pemprov DKI Jakarta tentunya akan berperan penting dalam mendongkrak kembali pendapatan daerah pasca keterpurukan ekonomi provinsi DKI Jakarta. Hal ini karena Pendapatan Asli Daerah (PAD) mencerminkan daerah, berapa PAD yang diterima masyarakat dan bagaimana kontribusi masyarakat dimaksudkan untuk membiayai pembangunan masyarakat dalam rangka kesejahteraan masyarakatnya. Hal ini sejalan dengan arahan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, bahwa fokus pembangunan nasional harus diarahkan baik pada potensi masing-masing daerah maupun pada kondisi aktual. Fokus pembangunan adalah industri, pariwisata, ketahanan pangan, mikro, UKM, infrastruktur, transformasi digital, pembangunan rendah karbon, reformasi rendah karbon, reformasi jaminan sosial, reformasi pendidikan dan keterampilan, dan reformasi perawatan kesehatan, dengan tujuan dan sasaran yang saat ini perlu disikapi di Indonesia sehubungan dengan perang melawan virus COVID-19 yang sedang berkembang. Semua pendapatan dan/atau pengeluaran yang dapat diganti yang akan diterima kembali oleh pemerintah negara bagian baik pada tahun anggaran yang

bersangkutan maupun pada tahun anggaran yang diharapkan.

4. Simpulan

Anggaran Pendapatan merupakan suatu batas minimum dari keseluruhan pemasukan yang telah dijadikan sasaran yang wajib diperoleh oleh rezim wilayah. Berbelanja Wilayah merupakan peranan penguasa kurangi angka kekayaan bersih. Berbelanja Wilayah wajib dipakai buat penerapan hal rezim yang jadi wewenang penguasa provinsi serta penguasa kabupaten atau kota yang terdiri dari hal harus serta hal opsi yang diresmikan dengan peraturan perundangundangan. Pemasukan Asli Wilayah(PAD) ialah penumpukan dari Pos Pendapatan Pajak yang terdiri atas Pajak Wilayah serta Pungutan Wilayah, Pos Pendapatan Non Pajak berbentuk pendapatan hasil Industri Kepunyaan Wilayah, dan pos pendapatan pemodal dan pengelolaan basis energi. Berbelanja Modal merupakan pengeluaran yang dicoba pada bagan pembuatan modal yang karakternya menaikkan peninggalan konsisten atau inventaris yang membagikan guna lebih dari satu rentang waktu akuntansi, tercantum didalamnya merupakan pengeluaran buat bayaran perawatan yang karakternya menjaga ataupun menaikkan era guna, menaikkan kapasitas serta mutu peninggalan. Pemasukan Asli Wilayah mempengaruhi positif kepada Berbelanja modal maksudnya terus menjadi besar pemasukan wilayah yang didapat sehingga terus menjadi bertambah pula Berbelanja Modal yang hendak dicoba. erhitungan kala kategorisasi perhitungan berbelanja alhasil mendapatkan sebagian aspek buat memikirkan hasil ataupun bayaran yang cocok serta berdaya guna, dan perhitungan di tahun lebih dahulu. Didapat hasil kalau varians yang dilaksanakan dengan cara global memperoleh semua yang terhitung membuahkan profit, disebabkan realiasi tercantum lebih kecil dibanding perhitungan yang diserahkan.

5. Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah berkenan bekerjasama selama penelitian ini.

6. Pernyataan Conflicting Interests

Penulis menyatakan tidak ada potensi konflik kepentingan sehubungan dengan penelitian, kepengarangan, dan/atau publikasi dari artikel ini.

References

- Arni Asari, N. M., & Suardana, K. A. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain- Lain Pendapatan Daerah yang Sah pada Belanja Daerah. *E-Jurnal Akuntansi*, 877. <https://doi.org/10.24843/eja.2018.v25.i02.p03>
- Azizah, N., & Dewi, A. C. (2021). Analisis Perkembangan Bahasa Semantik Dan Sintaksis Anak Dalam Kegiatan Belajar Dari Rumah. 6(2), 149–156.
- Dinamika, J., Pembangunan, E., & Nasir, M. S. (2019). Analisis Sumber- Sumber Pendapatan Asli Daerah Setelah Satu Dekadeotonomi Daerah. *JDEP* 2(1). https://ejournal.undip.ac.id/index.php/dinamika_pembangunan/index
- Fathiyah, F., Sukmana, A., & Majid, H. (2021). Analisis Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Jambi. *J-MAS (Jurnal Manajemen Dan Sains)*, 6(1), 117. <https://doi.org/10.33087/jmas.v6i1.236>
- Nul Hakim, B., D-III Kebidanan, P., & Hafshawaty Pesantren Zainul Hasan, Stik. (n.d.). *Oversight Right Of Regional House Of Representatives (Dprd) To The Implementation Of Regional Income And Expenditure Budget*.
- Nyoman Sri Ayu Lestari, N., Wayan Bagia, I., & Putu Agus Susila Jana, G. (2018). Pengaruh Anggaran Pendapatan Belanja Negara (Apbn) Terhadap Belanja Langsung Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. *Bisma: Jurnal Manajemen*, 4(1).

- Sembiring, E. A. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Kabupaten Dan Kota Provinsi Sumatera Utara. *Accumulated Journal*, 1(2). www.ksap.org
- Sudarmana, I. P. A., & Sudiarta, G. M. (2020). Pengaruh Retribusi Daerah Dan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Dinas Pendapatan Daerah. *E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana*, 9(4), 1338. <https://doi.org/10.24843/ejmunud.2020.v09.i04.p06>
- Yasin, M. (n.d.). *Analisis Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Pembangunan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten/Kota Jawa Timur Analysis Of Original Regional Income And Construction Expense On Economic Growthin District And Jawa Timur City*.

Tentang Penulis

Asmi Rezkiah Tanjung, Saat ini penulis sebagai Mahasiswa di Jurusan Administrasi Publik, Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta.

Salsabila Rahmadani, Saat ini penulis sebagai Mahasiswa di Jurusan Administrasi Publik, Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta

Ridho Satria Putra Kelana, Saat ini penulis sebagai Mahasiswa di Jurusan Administrasi Publik, Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta